



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KOPERASI DAN UKM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022**

I. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Rincian Program / Kegiatan Yang Dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah adalah :

1. Program dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 diarahkan pada :

1. Kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi dan lembaga diklat, lembaga keuangan, dunia usaha, lembaga permodalan dan masyarakat.
2. Pengadaan sarana dan prasarana pemerintah daerah
3. Penataan pelayanan dan administrasi.
4. Penilaian kinerja

Berdasarkan kebijakan tersebut telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

dengan kegiatan :

1) Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah

- a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

dengan kegiatan :

1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

dengan kegiatan :

1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

2) Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro

6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

dengan kegiatan :

1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)

dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**
 - a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - b. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - c. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - d. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

6. Program Pengembangan Umkm

- 1) **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**
 - a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

2. Realisasi Program dan Kegiatan

1. **Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota,** dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

1.1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.*

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Input : **Jumlah Dana : Rp3.669.940,-**

Output : 1. Persentase IKU OPD yang tercapai

Outcome : 2. Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi : **Keuangan : Rp, 1.733.500 - (47,24%)**

Fisik : 47.24%)

b. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*

Input : **Jumlah Dana : Rp. 2.539.960,-**

Output : 1. Persentase IKU OPD yang tercapai

Outcome : 2. Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi : **Keuangan : Rp. 0,- (0%)**

Fisik : 0%

c. *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*

Input : **Jumlah Dana : Rp. 1.429.960,-**

Output : 1. Persentase IKU OPD yang tercapai
Outcome : 2. Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi : **Keuangan : Rp. Rp. 0,- (0%)**
Fisik : 0%

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Input : **Jumlah Dana : Rp. 2.539.960,-**
Output : 1. Persentase IKU OPD yang tercapai
Outcome : 2. Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi : **Keuangan : Rp. 0,- (0%)**
Fisik : 0%

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Input : **Jumlah Dana : Rp. 1.429.960,-**
Output : 1. Persentase IKU OPD yang tercapai
Outcome : 2. Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi : **Keuangan : Rp. 0,- (0%)**
Fisik : 0%

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Input : **Jumlah Dana : Rp 1.579.960,-**
Output : 1. Persentase IKU OPD yang tercapai
Outcome : 2. Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi : **Keuangan : Rp. 710.400,- (44,96%)**
Fisik : 45%

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Input : **Jumlah Dana : Rp. 4.574.840,-**
Output : 1. Persentase IKU OPD yang tercapai
Outcome : 2. Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Realisasi : **Keuangan : Rp. 2.106.000 ,- (46,03%)**
Fisik : 46,03%

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Input : **Jumlah Dana : Rp. 3.064.335.710,-**

Output : 1. Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD

Outcome : 2. Tersedianya dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Gaji dan Tunjangan PNS 1 Tahun)

Realisasi : **Keuangan : Rp. 1.562.088.346,- (50,98%)**

Fisik : 50,98%

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Input : **Jumlah Dana : Rp. 6.119.920,-**

Output : 1. Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD

Outcome : 2. Tersedianya Laporan hasil penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Realisasi : **Keuangan : Rp. 2.913.540,- (47,61%)**

Fisik : 47,61%

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Input : **Jumlah Dana : Rp. 1.140.000,-**

Output : 1. Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD

Outcome : 2. Tersedianya dokumen Dokumen Laporan Keuangan Tahunan (NERACA, CALK, LRA)

Realisasi : **Keuangan : Rp. 3.541.088,- (99,76%)**

Fisik : 100%

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Input : **Jumlah Dana : Rp. 3.549.780,-**

Output : 1. Persentase temuan hasil pemeriksaan keuangan OPD

Outcome : 2. Tersedianya dokumen Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 1 Tahun

Realisasi : **Keuangan : Rp. 830.760,- (49,59%)**

Fisik : 49,59%

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Input : **Jumlah Dana : Rp. 3.463.376,-**

Output : 1. Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah

Outcome : 2. Tertibnya dokumen administrasi kepegawaian

Realisasi : **Keuangan : Rp. 1.727.114,- (49,87%)**

Fisik : 50%

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : **Jumlah Dana : Rp. 181.387.025,-**

Output : 1. Persentase sarana prasarana kondisi baik

Outcome : 2. Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor, Elektronik/Komputer, Rumah Tangga dan Meubelair

Realisasi : **Keuangan : Rp. 153.228.553,- (84.48%)**

Fisik : 84.48%

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Input : **Jumlah Dana : Rp. 20.000.000,-**

Output : 1. Persentase sarana prasarana kondisi baik

Outcome : 2. Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu Dinas 1 tahun

Realisasi : **Keuangan : Rp. 8.420.000,- (42,10 %)**

Fisik : 42,10 %

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Input : **Jumlah Dana : Rp. 99.304.000,-**

Output : 1. Persentase sarana prasarana kondisi baik

Outcome : 2. Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah

Realisasi : **Keuangan : Rp. 23.892.900,- (24,06%)**

Fisik : 24,06%

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : **Jumlah Dana : Rp 62.920.000,-**

Output : 1. Layanan pemerintahan daerah

Outcome : 2. Peralatan dan perlengkapan kantor yang disservice dan sewa kendaraan roda 4

Realisasi : **Keuangan : Rp. 21.460.000,- (34,11 %)**

Fisik : 34,11 %

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Input : **Jumlah Dana : Rp. 46.302.000,-**

Output : 1. Layanan pemerintahan daerah

Outcome : 2. Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan honorarium PTT 12 bulan

Realisasi : **Keuangan : Rp. 19.819.999,- (42,81%)**

Fisik : 42,81%

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Input : **Jumlah Dana : Rp. 99.631500,-**

Output : 1. Persentase sarana prasarana kondisi baik

Outcome : 2. Terbayarnya Perpanjangan STNK roda 2, 22 unit dan roda 4, 4 unit

Realisasi : **Keuangan : Rp. 54.319.445,- (54,52%)**

Fisik : 54,52%

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

2.1 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah

- a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Input : **Jumlah Dana : Rp. 32.535.393,-**

Output : 1. Jumlah Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam

Outcome : 2. Terlaksananya Kegiatan Bimtek Fasilitasi Perizinan Koperasi KSP/USP (30 Koperasi)

Realisasi : **Keuangan : Rp. 1.651.000,- (5,07%)**

Fisik : 5,07%

3. Program pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan :

3.1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Input : **Jumlah Dana : Rp. 64.595.946,-**

Output : 1. Persentase kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan

Outcome : 2. Terlaksananya Pelatihan Kapasitas SDM Pengawas Koperasi KSP/USP dan terbentuknya Tim Satgas Koperasi, KSP/USP

Realisasi : **Keuangan : Rp. 0,- (0%)**

Fisik : 0%

- b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Input : **Jumlah Dana : Rp. 137.165.110,-**
Output : 1. Persentase kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan
Outcome : 2. Pelatihan Tata Kelola Kepatuhan Koperasi Terhadap Perundang-undangan
Realisasi : **Keuangan : Rp. 53.830.002,- (39,24%)**
Fisik : 39,24%

4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

4.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Input : **Jumlah Dana : Rp. 136.919.688,-**

Output : 1. Persentase Koperasi yang dilatih

Outcome : 2. Pelatihan Pengembangan Koperasi Mandiri Berbasis Digital

Realisasi : **Keuangan : Rp. 125.812.144,- (91,89 %)**

Fisik : 91,89 %

4.2 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro

Input : **Jumlah Dana : Rp. 263.879.532,-**

Output : 1. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro berkualitas

Outcome : 2. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Makanan 60 Usaha mikro

Realisasi : **Keuangan : Rp. 209.417.916,- (79,36 %)**

Fisik : 79,36 %

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, dilaksanakan dengan kegiatan

5.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Input : **Jumlah Dana : Rp. 62.094.391,-**

Output : 1. Prosentase Peningkatan Aset dan Omset Koperasi

Outcome : 2. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Tematik (60 Unit Koperasi)
Realisasi : **Keuangan : Rp. 5.044.500,- (8,12%)**
Fisik : 8,12%

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

6.1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Input : **Jumlah Dana : Rp. 54.411.280,-**
Output : 1. Prosentase Peningkatan Aset dan Omset UMKM
Outcome : 2. Validasi data UMKM
Realisasi : **Keuangan : Rp. 16.628.160,- (30,56%)**
Fisik : 30,56%

b. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Input : **Jumlah Dana : Rp. 26.005.473,-**
Output : 1. Prosentase Peningkatan Aset dan Omset UMKM
Outcome : 2. Bimtek Kelayakan Usaha bagi UMKM (30 Usaha Mikro)
Realisasi : **Keuangan : Rp. 0,- (0%)**
Fisik : 0%

c. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Input : **Jumlah Dana : Rp. 26.325.137,-**
Output : 1. Prosentase Peningkatan Aset dan Omset UMKM
Outcome : 2. Terlaksananya Workshop Pendaftaran NIB Melalui OSS
Realisasi : **Keuangan : Rp. 552.000,- (2,10%)**
Fisik : 2,10%

d. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Input : **Jumlah Dana : Rp. 432.993.693,-**
Output : 1. Prosentase Peningkatan Aset dan Omset UMKM
Outcome : 2. Bimtek Pengembangan Potensi Usaha Mikro (30 Usaha Mikro)
Realisasi : **Keuangan : Rp. 400.835.500,- (92,57%)**
Fisik : 92,57%

7. Program Pengembangan Umkm

7.1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Input : **Jumlah Dana : Rp. 4.481.018.876,-**

Output : 1. Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil

Outcome : 2. Tersalurnya Bantuan Sarana Prasarana Usaha untuk Usaha Mikro Kecil 500 Usaha Mikro Kecil

Realisasi : **Keuangan : Rp. 3.824.402.210,- (85,35 %)**

Fisik : 85,35 %

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- i. Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan .
- ii. Asumsi kesinambungan entitas, berate bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- iii. Asumsi ketrukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

1.2 Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan – LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui saat kas dikeluarkan.

- a) Basis Akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa :
 1. Pendapatan – LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima
 2. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah/ kas SKPD
- b) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 - 1) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c) Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

1.3 Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

1.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, antara lain :

i. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1. Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan yang terdapat pada Daerah Sebagian besar adalah merupakan Pendapatan atas Tuntutan Ganti Rugi /TGR yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat. Dokumen sumber yang

digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS),

2. Akuntansi Belanja (LRA)

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi SAL (Saldo Anggaran Lebih) dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk khususnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

3. Akuntansi Surplus Defisit

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit - LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

ii. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional khususnya pada Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari pendapatan-LO, dan beban. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

1. Akuntansi Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

a. Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi pendapatan menurut PP no 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

b. Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan yaitu; Pendapatan Pajak-LO, Pendapatan Bukan Pajak –LO, Pendapatan Hibah-LO, Pendapatan Lainnya. Pendapatan-LO diakui saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan

Pendapatan-LO yang diakui saat timbulnya hak adalah:

- Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan

- Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b) Pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi)
Untuk mengakui Pendapatan-LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan

2. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

a. Klasifikasi Beban

1) Beban Operasi

Beban Operasi terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang, , Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

Beban diakui saat :

- ✓ Timbulnya kewajiban
Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah
- ✓ Terjadinya konsumsi aset
Adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah
- ✓ Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- ✓ Koreksi atas Beban (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan.

3. Akuntansi Surplus Defisit – LO

Surplus –LO adalah selisih lebih antara pendapatan- LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Defisit - LO adalah selisih kurang antara pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

iii. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

iv. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

1) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak,

Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

- (1) **Kas di Bendahara Pengeluaran** adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.
- (2) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR (Tuntutan Ganti Rugi) ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (3) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari

sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jembatan, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

(3) Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

(4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

(2) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. Aset ini merupakan kewenangan PPKD bukan SKPD, sehingga dalam laporan keuangan SKPD Kab. Loteng tidak terdapat Tagihan Jangka Panjang/ tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Namun data ini muncul di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Kewajiban

adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

3) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Tengah.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

2.1 Pendapatan-LRA

Pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah tidak ada Target PAD (Pendapatan Asli Daerah) namun ada Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan jumlah pagu anggaran yang tertuang di APBD 2022 sebesar Rp. 27.000.000.00,- , terdapat realisasi sampai bulan Juni 2022 sebesar Rp. 17.000.000.00,- yang berasal dari Pendapatan sumbangan pihak ketiga Dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK) .

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan lain-lain PAD yang sah			
2	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	27.000.000.00,-	17.000.000.00,-	63%
	Jumlah	27.000.000.00,-	17.000.000.00,-	63%

2.2 Belanja - LRA

Dari Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam APBD 2022 sebesar Rp. 9.361.664.774,00 realisasi sampai dengan Bulan Juni 2022 mencapai Rp. 6.498.389.189,00 atau 69,41% dari anggaran yang tersedia. Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	9.240.484.999,00	6.377.209.414,00	69
2	Belanja Modal	121.179.775,00	121.179.775,00	100
	Jumlah	9.361.664.774,00	6.498.389.189,00	69,41

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi s/d Bulan Juni tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 6.377.209.414,00 atau 69% dari anggaran sebesar Rp. 9.240.484.999,00

Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	3.079.917.710,00	1.569.228.346,00	50,95
2.	Belanja Barang dan Jasa	6.160.567.289,00	4.807.981.068,00	78,04
J u m l a h		9.240.484.999,00	6.377.209.414,00	69

Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 1.569.228.346,00 dari target anggaran sebesar Rp. 3.079.917.710,00 atau 50,95% dari target Belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
	Belanja Pegawai Tidak Langsung			
1	Belanja Gaji Pokok PNS/ UangRepresentasi	1.514.243.733,00	82.7447.320,00	54,64
2	Belanja Tunjangan Keluarga	142.742.132,00	79.368.404,00	55,6
3	Belanja Tunjangan Jabatan	149.634.000,00	83.635.000,00	55,89
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	4.1687.250,00	22.475.000,00	53,91
5	Belanja Tunjangan Beras	85.622.677,00	47.435.100,00	55,4
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.930.634,00	3.366.170,00	48,57
7	Belanja Pembulatan Gaji	26.284,00	12.796,00	48,68
8	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.123.449.000,00	498.348.556,00	44,36
9	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	15.582.000,00	7.140.000,00	45,82
	Jumlah	3.079.917.710,00	1.569.228.346,00	50,95

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada APBD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 6.160.567.289,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.807.981.068,00 atau 78,04% sampai dengan Bulan Juni 2022. Berikut Rinciannya :

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Belanja Barang Jasa				
1	Belanja Barang Pakai Habis	4.757.933.289,00	3.948.514.824,00	809.418.465,00	82,99
2	Belanja Jasa Kantor	351.390.000,00	131.146.345,00	22.0243.655,00	37,32
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	73.250.000,00	28.250.000,00	45.000.000,00	38,57
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	429.250.000,00	402.787.000,00	26.463.000,00	93,84
5	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	321.000.000,00	248.250.000,00	72.750.000,00	77,34
6	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.420.000,00	24.960.000,00	8.460.000,00	74,69
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	105.604.000,00	23.892.900,00	81.711.100,00	22,62
	JUMLAH	6.160.567.289,00	4.807.981.068,00	454.627.755,00	78,04

3. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2022 Anggaran untuk belanja modal tertuang dalam APBD tahun 2022 sebesar Rp. 121.179.775,00 dan terealisasi sebesar Rp. 121.179.775,00 atau sebesar 100% dari anggaran yang disediakan. Berikut rinciannya:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	79.679.775,00	79.679.775,00	100
2	Belanja Modal Komputer Unit	22.500.000,00	22.500.000,00	100
3	Belanja Modal Peralatan	19.000.000,00	19.000.000,00	100

	Komputer			
	Jumlah	121.179.775,00	121.179.775,00	100

2.3 Surplus/Defisit LRA

Dari anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, maka terjadi Defisit anggaran adalah sebesar Rp. (9.334.664.774,00)

IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

3.1 Pendapatan - LO

Pendapatan LO pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Lombok Tengah diakui saat penerimaan kas, sehingga pendapatan LO sama dengan pendapatan LRA, pendapatan ini berasal dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan jumlah pagu anggaran yang tertuang di APBD 2022 sebesar Rp. 27.000.000.00,- , terdapat realisasi sampai bulan Juni 2022 sebesar Rp. 17.000.000.00,- yang berasal dari Pendapatan sumbangan pihak ketiga Dana Pembangunan Daerah Kerja (PDK) .

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan lain-lain PAD yang sah			
2	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	27.000.000.00,-	17.000.000.00,-	62,96
	Jumlah	27.000.000.00,-	17.000.000.00,-	62,96

3.2 Beban- LO

a. Beban Operasi

Beban operasi sampai dengan Bulan Juni tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 6.375.949.794,00 Beban Operasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

No.	BEBAN	Realisasi
1	Beban Pegawai	1.569.228.346,00
2	Beban Barang dan Jasa	4.806.721.448,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00
	Jumlah Beban	6.375.949.794,00

Dari table diatas, diketahui **Beban pegawai** sebesar **Rp. 1.569.228.346,00** yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 1.063.739.790,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp.

498.348.556,00 **Beban Barang dan jasa** sebesar **Rp. 4.806.721.448,00** yang terdiri dari Beban Bahan Pakai Habis sebesar Rp. 3.948.514.824,00, dikurangi Beban Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 50.069.864,00 , Beban Jasa Kantor sebesar Rp. 131.146.345,00, Beban Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 24.960.000,00, Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 28.250.000,00, Beban Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 402.787.000,00, Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 248.250.000,00, Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp. 23.892.900,00.

3.3 Surplus/Defisit LO

Dari realisasi pendapatan serta beban sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, maka terjadi Defisit LO adalah sebesar (6.357.865.094)

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Saldo Ekuitas Akhir per Desember 2021 adalah sebesar Rp. 756.583.341,00 yang merupakan saldo ekuitas awal 2022. sebagai pengurang Ekuitas, Defisit LO sebesar Rp. (6.357.865.094) sedangkan Rekening RK PPKD sebesar Rp. 6.502.310.136,00, dijadikan penambah nilai ekuitas Berikut perhitungannya :

URAIAN	2022
EKUITAS AWAL	756.583.341
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6.357.865.094)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Aset Tetap (Reklas dari Disprindag)	
Koreksi Nilai Aset Tetap (Koreksi kesalahan tahun sebelumnya)	
Akumulasi penyusutan aset tetap	
RK PPKD	6.502.310.136
EKUITAS AKHIR	901.028.383,00,00

VI. NERACA

5.1 ASET LANCAR

1) Persediaan

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 22.005.647,00 Persediaan Bahan Pakai Habis berdasarkan hasil perolehan per per 30 Juni 2022 sebesar Rp. 2.668.512,00,00 sehingga jumlah nilai persediaan per 30 Juni sebesar **Rp. 24.647.159,00**

5.2 ASET

1) Aset Tetap

Saldo Aset tetap berdasarkan hasil perolehan per 31 Desember 2021 dan saldo per 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp. **755.174.449** dan Rp. **876.354.224,00,00** nilai buku aset tetap dikurangi dengan nilai Akumulasi Penyusutan, Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM mempunyai Jumlah aset tetap pada Per Desember 2021 dan per Juni 2022 terjadi Perubahan dengan rincian Aset Tetap berikut ini :

Jenis Aset	Saldo per Desember 2021	Mutasi		Saldo per Juni 2022
		Tambah	Kurang/Penghapusan	
Tanah	298.243.500,00			298.243.500,00
Peralatan dan Mesin	1.464.441.144,00	121.179.775,00		1.585.620.919,25
Gedung & Bangunan	315.676.000,00			315.676.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.000.000,00			8.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	1.670.000,00			1.670.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.332.856.195,25)			(1.332.856.195,25)
Jumlah AT	755.174.449,00	121.179.775,00		876.354.224,00

Uraian lebih rinci nilai aset tetap dijelaskan pada tabel berikut ini :

1) Peralatan dan Mesin

Jenis Aset	Mutasi		Saldo Per Juni 2022
	Tambah	Kurang	
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			-
Meubelair	79.679.775,00		79.679.775,00
Komputer Unit Lainnya	22.500.000,00		7.500.000,00

Peralatan Komputer Lainnya	19.000.000,00		2.000.000,00
Jumlah	121.179.775,00	-	121.179.775,00

Dari table diatas, terdapat penambahan nilai asset sebesar Rp. **121.179.775,00** yang terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp. **121.179.775,00**.

5.3. EKUITAS

Ekuitas per 30 Juni 2022 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp. **901.028.383,00,00**.

Praya, 16 Juli 2022
Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Lombok Tengah

IKSAN, S. Hut
NIP. 19670727 199503 1 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

Praya, 16 Juli 2022
Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Lombok Tengah,

IKSAN, S. Hut
NIP. 19670727 199503 1 006